

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan *good government*, termasuk negara Indonesia. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah membawa dampak perubahan yang baik dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Di sisi lain transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat di era reformasi saat ini. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi yang mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk UU dan Peraturan Pemerintah (PP) yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Laporan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD sehingga SKPD diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi supaya dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Kewajiban

pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang menyebutkan bahwa “untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. SIMDA keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dianggap penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa laporan keuangan berkualitas mampu memenuhi karakteristik meliputi : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

Menurut Roviyantie (2011), laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Demikian juga halnya dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah dan juga organisasional tentang pemerintahan.

Laporan keuangan sebagai salah satu media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada

publik sehingga pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Pemerintah kota Palembang adalah salah satu pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat di pahami, dan dapat di bandingkan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mendapat penilaian dari auditor pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) berupa opini audit. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kota Palembang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan pada poin 1.1, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : Apakah ada pengaruh penerapan SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD kota Palembang ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai kerelevanan, keandalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami berdasarkan laporan keuangan tahun 2014.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu : Untuk mengetahui pengaruh penerapan SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi pemerintah.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD kota Palembang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini penulis hanya akan menguraikan dan memberikan gambaran mengenai penyusunan laporan akhir secara garis besar. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu : Latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas permasalahan, meliputi : Sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), aplikasi SIMDA keuangan, laporan keuangan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel, serta uji validitas dan reliabilitas.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis data, meliputi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan uji validitas dan reliabilitas serta pengujian hipotesis.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan atau hasil dari bab IV. Dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.